

RESILIENSI ANGGARAN DAERAH: INDEKS *ANTICIPATORY CAPABILITIES*, *COPING CAPABILITIES*, DAN *VULNERABILITY*

Ika Kurnia Indriani¹, Soraya², Ninik Kurniasih³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Pontianak

*Korespondensi : ikakurniaindriani@gmail.com

Abstrak

Resiliensi anggaran menjadi faktor utama penanganan pemerataan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kapasitas anggaran tertinggi akan membantu pemerintah kota untuk merealisasikan program-program strategis di situasi kritis seperti pandemi COVID-19, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Penilaian kapasitas anggaran bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemerintah kota di Indonesia dalam mengelola APBD. Penilaian ketahanan anggaran menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data kearsipan. Hasil penilaian menunjukkan Kota Mataram, Tidore, Batam, dan Sabang memperoleh indeks kapasitas anggaran tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan indeks tertinggi mempunyai ketahanan dalam menangani situasi tanpa syarat seperti pandemi COVID-19 atau perubahan iklim. Sedangkan Kota Bengkulu, Bontang, dan Tegal memiliki indeks kapasitas anggaran terendah. Pemerintah kota dengan indeks terendah perlu mengoptimalkan sistem pengelolaan APBD ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menentu.

Kata kunci: *Anticipatory, Coping Capabilities, Vulnerability*, dan Resiliensi Anggaran.

Abstract

Budget resilience is the main factor for handling economic distribution aftermath of COVID-19 pandemic. The highest budget capacity will help municipal government to realize strategic programs in critical situations such as COVID-19 pandemic, while maintaining regional economic growth. The budget capacity assessment aims to analyze the ability of municipal governments in Indonesia to manage the APBD. The assessment of budget resiliency employs a descriptive quantitative approach with archival analysis data. The results of the assessment showed that the municipalities of Mataram, Tidore, Batam, and Sabang obtained the highest budget capacity index. This condition that the government with the highest index has the resilience to handle unconditional situations such as the COVID-19 pandemic or climate change. Meanwhile, the municipalities of Bengkulu, Bontang, and Tegal have the lowest budget capacity index. The city government with the lowest index needs to optimize the APBD management system when faced unconditional situation.

Keywords: *Anticipatory, Coping Capabilities, Vulnerability, and Budget Resilience.*

PENDAHULUAN

Ketahanan keuangan (financial resilience) yang baik menjadi sebuah indikator dapat terlaksananya program dan kegiatan dalam mencapai tujuan negara (Ritonga et al., 2019). Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan baru dan tidak terduga yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Kondisi ini merubah tatanan kehidupan masyarakat, perekonomian negara dan daerah, dan meningkatkan jumlah anggaran belanja pada sektor kesehatan. Penyebaran kasus COVID-19 sebagian besar di mulai pada wilayah perkotaan, akibat tingginya mobilitas masyarakat. Hal ini menyebabkan wilayah kota menjadi pusat penyebaran COVID-19. Jumlah penyebaran kasus di wilayah kota mencapai 50% dari

total kasus konfirmasi (Nasional, n.d.) (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Wilayah kota yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi merupakan kota besar di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran kasus dengan membuat regulasi seperti menerapkan protokol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ulya, 2020). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia berdampak positif terhadap penyebaran virus. Namun menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi, PHK, penurunan impor, peningkatan harga, dan kerugian sektor pariwisata karena menurunnya okupansi (Yamali & Putri, 2020). Penyebaran kasus yang tinggi berdampak kepada resiliensi anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah menghadapi kehilangan besar atas pendapatan dan peningkatan belanja diakibatkan pandemi (Green & Loualiche, 2021). Pemerintah daerah melaksanakan strategi realokasi dan *refocusing* anggaran untuk dialihkan kepada program penanggulangan. Pemerintah daerah melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial selama pandemi (Sanjaya, 2020). Pertumbuhan ekonomi nasional berada pada minus 2,1 persen pada tahun 2020, merupakan yang terendah sejak krisis ekonomi asia 1997-1998 (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi berdampak kepada penurunan pendapatan pemerintah dari sektor pajak (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Anggaran pemerintah direalokasi untuk penanganan pandemi yang diperoleh dari anggaran non prioritas dan belanja modal (Hasibuan et al., 2020). Seluruh level pemerintah menerapkan kebijakan darurat dalam menghadapi pandemi (Wu & Lin, 2020).

Pemerintah daerah dituntut cepat dalam menangani kasus COVID-19 di daerahnya, agar persebaran virus dapat terkendali. Kondisi pandemi memperlihatkan cara pemimpin daerah dalam menanggulangi pandemi dengan cepat walaupun terjadi keterbatasan sumber daya (State, 2020). Pendapatan pemerintah daerah akan menurun, namun diwaktu yang sama sumber anggaran sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Bonaccorsi et al., 2020). Namun, sistem anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih ditopang oleh pemerintah pusat. Resiliensi anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tergantung dengan dana perimbangan pemerintah pusat (I. K. Indriani et al., 2019). *Anticipatory Capabilities* (AC) berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengelola vulnerabilities dari organisasi publik, khususnya dalam mengantisipasi kejadian sejak awal dan mengerti akan dampaknya ke organisasi (Anessi-Pessina et al., 2020). *Coping Capabilities* (CC) kemampuan mengelola sumber daya dalam kondisi tidak terduga untuk menghadapinya dan mengantisipasi kondisi tersebut (Anessi-Pessina et al., 2020). *Vulnerabilities* keterkaitan antara kondisi tidak terduga dan kapasitas organisasi dalam level penerimaan kondisi tersebut (Anessi-Pessina et al., 2020). Semakin tinggi kemampuan pembiayaan daerah maka akan semakin tinggi resiliensi anggaran dalam membiayai pengeluaran daerah (Auerbach et al., 2020).

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan besar terhadap keuangan pemerintah daerah akibat peningkatan belanja dan penurunan pendapatan sehingga

berpotensi mengalami krisis keuangan (OECD, 2020a). Krisis ekonomi dunia secara signifikan berpengaruh terhadap resiliensi anggaran keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan dimana kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik meningkat, namun terjadi penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi (Clouston et al., 2021). Pandemi COVID-19 berpotensi menghadirkan krisis ekonomi yang mengancam seluruh negara di dunia (Fajria et al., 2021). Resiliensi anggaran daerah yang baik akan membantu Indonesia terhindar dari krisis. Pemerintah daerah melakukan strategi jangka pendek didalam menghadapi pandemi (OECD, 2020b).

Indeks resiliensi anggaran daerah adalah teknik perhitungan yang menggunakan skoring atas kondisi anggaran pemerintah daerah dalam satu periode. Tujuan penilaian ini untuk menjadi acuan dalam efektifitas dan optimalisasi pengelolaan anggaran bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kejadian tidak terduga yang bersifat jangka pendek (Ritonga, 2015). Dalam penelitian ini berfokus kepada tiga indikator resiliensi anggaran daerah yaitu *anticipatory capabilities*, *coping capabilities*, dan *vulnerability*. Penilaian resiliensi anggaran daerah akan dilakukan dengan perhitungan indeks. Pemerintah daerah yang melaksanakan strategi jangka pendek dalam menangani COVID-19 (OECD, 2020b). Tiga indikator ini dapat mewakili penilaian resiliensi anggaran khususnya dari sisi resiliensi anggaran daerah jangka pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketahanan resiliensi anggaran daerah dimasa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai proyeksi bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kejadian tidak terduga yang berdampak kepada perubahan pola kehidupan masyarakat. Resiliensi anggaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kasus COVID-19 (I. K. et al Indriani, 2022). Hal ini membuktikan bahwa resiliensi anggaran yang baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus COVID-19 di wilayahnya (I. K. Indriani, 2022). Membentuk resiliensi anggaran yang baik dapat bermanfaat untuk menghadapi kejadian tidak terduga dan memudahkan daerah dalam menghadapinya (Desdiani et al., 2022).

METODE PENELITIAN

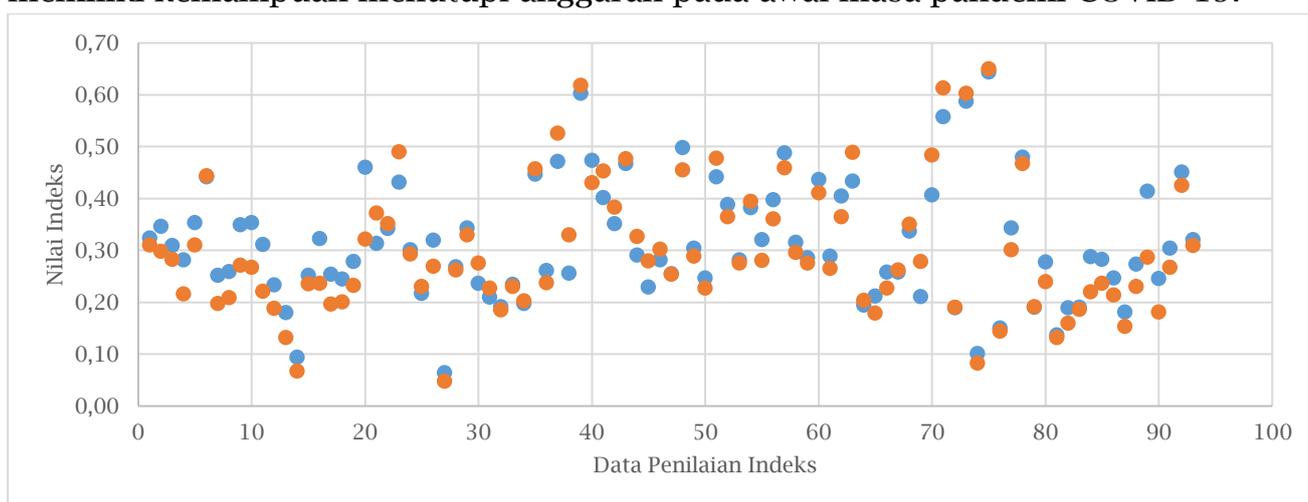
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan indikator *anticipatory capabilities*, *coping capabilities*, dan *vulnerability*. Penilaian resiliensi anggaran menggunakan teknik indeks indikator dan dimensi. Teknik analisis indeks akan menghasilkan bobot dan peringkat atas resiliensi anggaran pemerintah daerah. Indeks resiliensi anggaran daerah akan merepresentasikan ketangguhan resiliensi anggaran selama masa pendemi COVID-19. Penilaian indeks resiliensi anggaran menggunakan data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 dan 2021. Data diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 93 pemerintah kota di Indonesia. Perhitungan indeks dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan dengan rata-rata geometri aritmatika untuk menghasilkan nilai maksimum (1) dan minimum (0) (Ritonga 2015). Perhitungan indeks dimensi dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks dimensi} = (I \text{ indikator-1} + I \text{ indikator-2} + I \text{ indikator-3} + \dots) / n$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indeks *Anticipatory Capabilities*

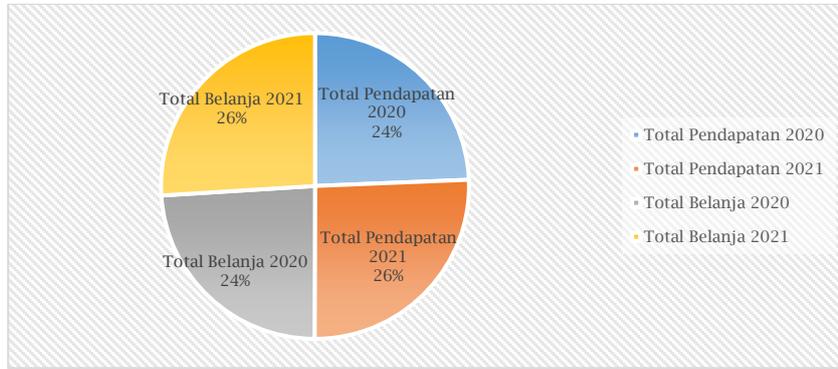
Indeks *anticipatory capabilities* nilai yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menyeimbangkan jumlah realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran (Ritonga, 2015). Penilaian indeks *anticipatory capabilities* menggunakan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), belanja operasional, dan belanja modal sebagai indikator utama dalam perhitungan. Pada gambar 1 hasil perhitungan indeks pada 93 pemerintah kota di Indonesia pada 0,10 hingga 0,65. Sebaran nilai indeks berada pada rentangan 0,20 dan 0,40. Indeks *anticipatory capabilities* mengindikasikan bahwa pemerintah kota di Indonesia memiliki kemampuan menutupi anggaran pada awal masa pandemi COVID-19.



Gambar 1. Persebaran Nilai Indeks Dimensi *Anticipatory capabilities*

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Secara nasional indeks *anticipatory capabilities* pemerintah kota berada pada rata-rata 0,31 dan 0,30. Pandemi COVID-19 tidak memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan daerah untuk merealisasikan pendapatan dan belanja. Secara keseluruhan pemerintah kota di Indonesia mampu merealisasikan pendapatan sebesar 140 triliun Rupiah pada 2020 dan 147 triliun Rupiah pada 2021. Realisasi belanja pada tahun 2020 mencapai 137 triliun Rupiah dan 149 triliun Rupiah pada 2021. Proporsi total pendapatan dan belanja dimasa pandemi COVID-19 meningkat 2 persen pada tahun 2021 menjadi 26 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan dan belanja pemerintah kota di Indonesia tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Gambar 2 menunjukkan proporsi realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota di Indonesia.



Gambar 2. Proporsi Total Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Pemerintah kota dengan indeks *anticipatory capabilities* tertinggi memiliki ketangguhan resiliensi anggaran dalam merealisasikan pendapatan dan belanja ditengah kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah kota Mataram dengan nilai indeks 0,64 pada 2021 dan 0,65 pada 2020 merupakan daerah dengan indeks tertinggi secara nasional. Pemerintah kota Mataram yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki realisasi total pendapatan 1,93 triliun Rupiah dan total belanja 1,45 triliun Rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah kota Mataram mampu meningkatkan realisasi pendapatan menjadi 2,04 triliun Rupiah dan belanja 1,58 triliun Rupiah. Kota Mataram mampu meningkatkan realisasi pendapatan daerah yang cukup tinggi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan belanja daerah bisa dilaksanakan secara lebih efisien dan optimal. Kondisi ini menjadi faktor utama bagi pemerintah kota Mataram mendapatkan indeks tertinggi secara nasional.

Indeks terendah yaitu pemerintah kota Bengkulu dengan indeks 0,06 dan 0,05. Realisasi pendapatan kota Bengkulu pada tahun 2020 1,07 triliun rupiah dan 1,39 triliun pada 2021. Realisasi anggaran kota Bengkulu yaitu total belanja pada masa pandemi lebih tinggi dibandingkan total pendapatan sehingga menyebabkan rendahnya *anticipatory capabilities*. Realisasi belanja mencapai 1,27 triliun rupiah dan 1,38 triliun rupiah.

Indeks *anticipatory capabilities* pemerintah kota berdasarkan kluster kepulauan menunjukkan hasil yang relatif stabil pada seluruh wilayah. Wilayah Sumatera dengan indeks tertinggi kota Solok dan Batam. Kota Bandung merupakan daerah dengan indeks tertinggi di pulau Jawa. Pada pulau Kalimantan indeks tertinggi diperoleh Kota Balikpapan. Kota Bima merupakan daerah dengan indeks tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kota Makassar untuk wilayah Sulawesi, Kota Tual untuk wilayah Maluku, dan Kota Sorong untuk wilayah Papua.

Indeks terendah pada wilayah Sumatera diperoleh Kota Bengkulu. Pada wilayah Jawa indeks terendah diperoleh Kota Depok dan Salatiga. Kota Tarakan dan Singkawang mendapatkan nilai indeks terendah di wilayah Kalimantan. Kota Bima memperoleh indek terendah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah sulawesi indeks terendah diperoleh Kota Palu. Kota ternate dan Kota Sorong memperoleh indeks terendah di wilayah Maluku dan Papua. Hasil perhitungan indeks *anticipatory capabilities* berdasarkan klaster kepulauan terdapat pada tabel 1.

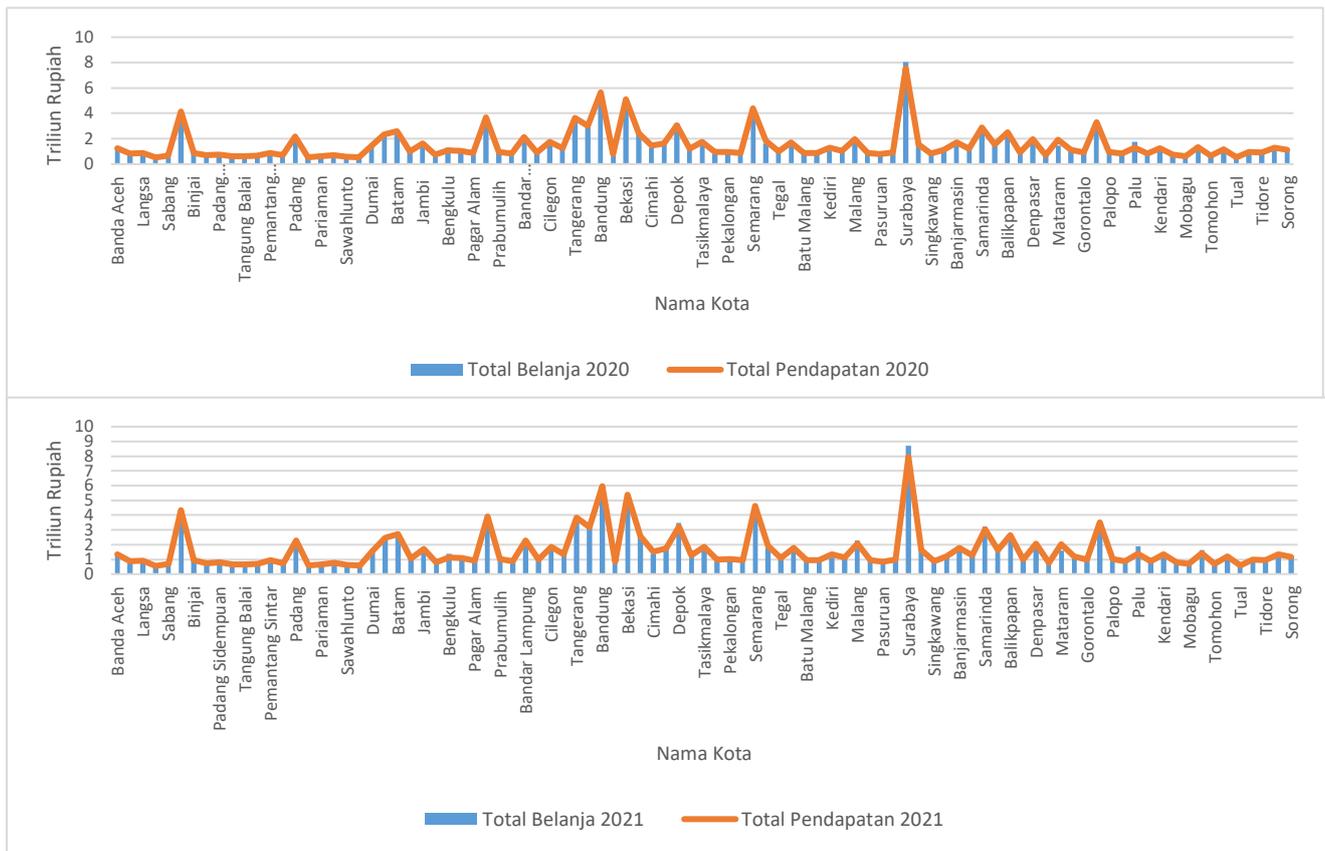
Tabel 1. Indeks Anticipatory Capabilities

| Klaster Kepulauan | | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Sumatera | Indeks Tertinggi | Solok (0,46) | Batam (0,49) |
| | Indeks Terendah | Bengkulu (0,06) | Bengkulu (0,05) |
| Jawa | Indeks Tertinggi | Bandung (0,60) | Bandung (0,62) |
| | Indeks Terendah | Depok (0,23) | Salatiga (0,23) |
| Kalimantan | Indeks Tertinggi | Balikpapan (0,56) | Balikpapan (0,61) |
| | Indeks Terendah | Tarakan (0,18) | Singkawang (0,18) |
| Bali dan Nusa Tenggara | Indeks Tertinggi | Mataram (0,64) | Mataram (0,65) |
| | Indeks Terendah | Bima (0,10) | Bima (0,08) |
| Sulawesi | Indeks Tertinggi | Makassar (0,48) | Makassar (0,47) |
| | Indeks Terendah | Palu (0,14) | Palu (0,13) |
| Maluku | Indeks Tertinggi | Tual (0,41) | Tual (0,29) |
| | Indeks Terendah | Ternate (0,25) | Ternate (0,18) |
| Papua | Indeks Tertinggi | Jayapura (0,45) | Jayapura (0,43) |
| | Indeks Terendah | Sorong (0,32) | Sorong (0,31) |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

Realisasi total belanja dan pendapatan pemerintah kota sangat mempengaruhi resiliensi anggaran selama pandemi COVID-19. Berdasarkan perhitungan indeks anticipatory capabilities resiliensi anggaran pemerintah kota di Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah kota masih bisa meningkatkan realisasi pendapatan daerah walaupun keadaan pada masa pandemi cukup sulit dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pada gambar 2 terlihat realisasi pendapatan dan belanja pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar realisasi pendapatan dan belanja daerah berkisar antara 2 triliun Rupiah. Namun, ada beberapa kota di Indonesia mampu merealisasikan pendapatan lebih dari 2 triliun Rupiah seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Palembang, Batam, Pekanbaru, Medan, dan Makassar. Dimana wilayah ini merupakan pusat ekonomi dan memiliki jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

Realisasi belanja pemerintah kota di Indonesia relatif tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Pemerintah kota mampu merealisasikan belanja daerah dengan nilai yang sama dengan realisasi pendapatan. Sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu merealisasikan belanja sebesar 2 triliun Rupiah. Namun, kota-kota besar di Indonesia mampu merealisasikan belanja lebih dari 2 triliun Rupiah. Kota Surabaya, Semarang, Bandung, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Palembang, Batam, Pekanbaru, Medan, dan Makassar memiliki realisasi belanja tertinggi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

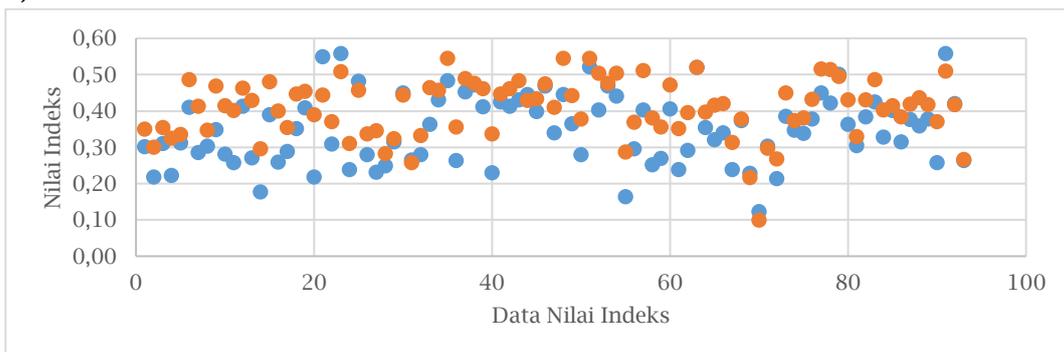


Gambar 3. Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Data Olahan, 2022

2. Indeks *Coping Capabilities*

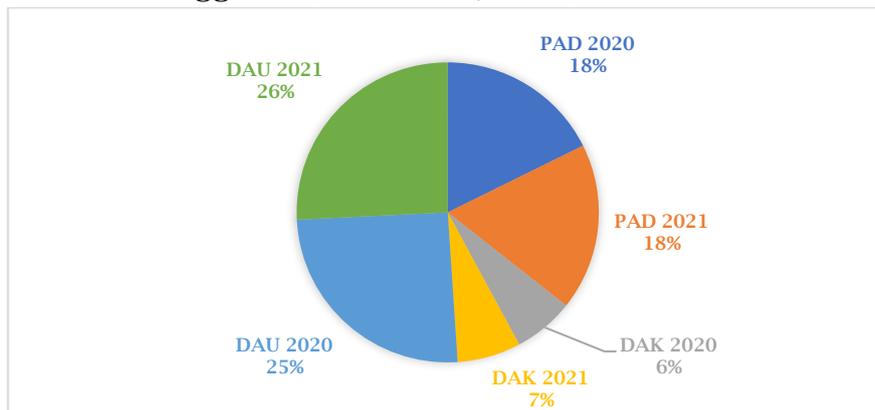
Indeks *coping capabilities* daerah nilai yang menunjukkan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar baik lembaga nasional ataupun dari lembaga internasional (Ritonga, 2015). Indeks *coping capabilities* menggunakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, dan belanja daerah sebagai indikator utama dalam perhitungan. Indeks ini akan menghasilkan informasi tentang kekuatan APBD dalam melaksanakan segala program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam satu periode anggaran (Ritonga, 2015). Pada gambar 4 hasil perhitungan indeks berada pada rentangan 0,10 hingga 0,60. Dimana nilai indeks pemerintah kota paling banyak berada pada nilai 0,30 hingga 0,05.



Gambar 4. Persebaran Nilai Indeks Dimensi *Coping Capabilities*

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

Secara nasional indeks *coping capabilities* pemerintah kota pada masa pandemi COVID-19 adalah 0,35 (2020) dan 0,41 (2021). Tingkat *coping capabilities* pemerintah kota di Indonesia masih bergantung dengan pendapatan dana transfer pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada gambar 3 realisasi pendapatan DAU dan DAK masih memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan realisasi PAD. Total realisasi DAU pada tahun 2020 mencapai 54 triliun Rupiah dan 55 triliun Rupiah pada 2021. Total realisasi DAK mencapai 13,8 triliun Rupiah dan 14,5 triliun Rupiah. Sedangkan, realisasi PAD pada tahun 2020 37,7 triliun Rupiah dan 38,4 triliun Rupiah. Pada gambar 3 PAD memiliki proporsi 18 persen, DAU 26 persen, dan DAK 7 persen. Ketahanan resiliensi anggaran pemerintah kota di Indonesia dari indeks *coping capabilities* masih cukup lemah karena mengandalkan pendapatan transfer pemerintah pusat. PAD memiliki proporsi yang kecil sehingga perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan. Pemerintah daerah harus pengoptimalkan PAD dalam meningkatkan resiliensi anggaran (Maizunati, 2017).



Gambar 5. Proporsi Realisasi PAD, DAU, dan DAK Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

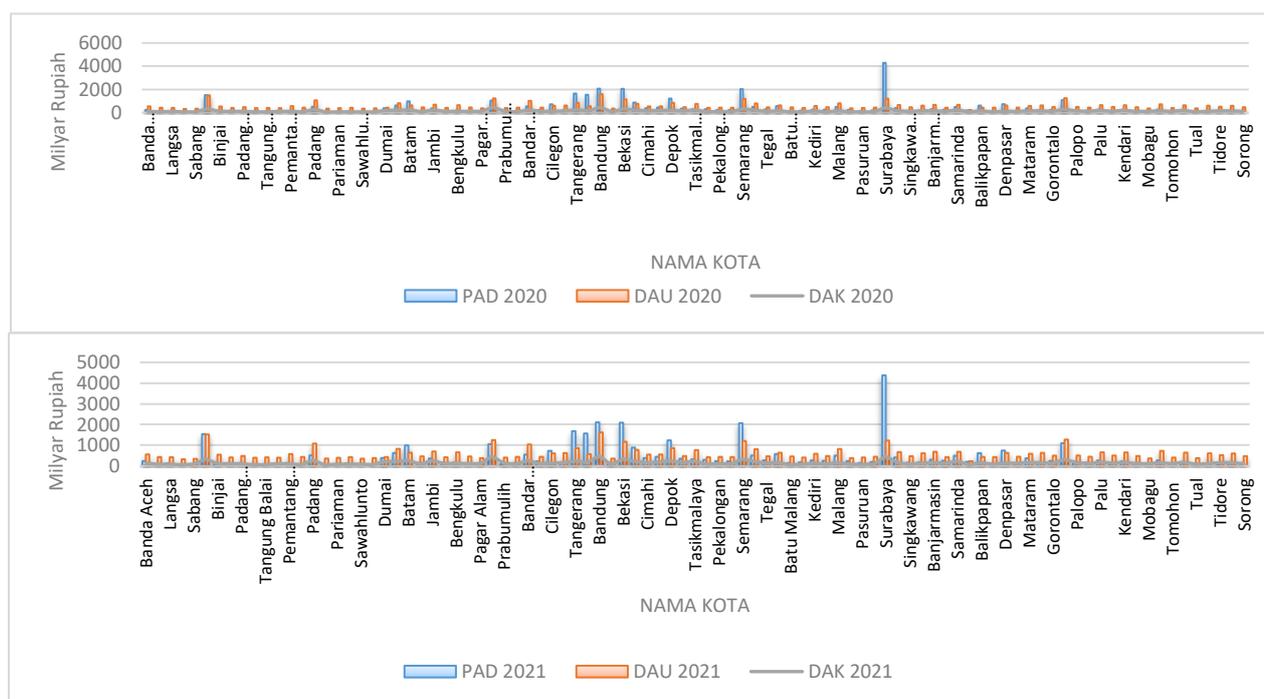
Hasil perhitungan *coping capabilities* pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pemerintah kota Tidore, kota Batam, dan kota Magelang memperoleh nilai indeks tertinggi secara nasional. Nilai indeks kota Tidore dan Batam yaitu 0,56, sedangkan kota Magelang memiliki skor 0,55. Pemerintah kota Bontang memperoleh indeks terendah dimasa pandemi COVID-19 dengan nilai 0,12 pada tahun 2020.

Indeks *coping capabilities* pemerintah kota berdasarkan klaster kepulauan menunjukkan hasil yang relatif stabil pada wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kota Batam, Surabaya, Cilegon, Banjarbaru, Palangkaraya, Denpasar, Palopo, Gorontalo, Tidore, dan Jayapura merupakan pemerintah kota dengan indeks tertinggi pada klaster kepulauan. Sedangkan, kota Bukittinggi, Prabumulih, Batu Malang, Bontang, Bima, Palu, Ternate, dan Sorong memperoleh nilai terendah pada indeks pada masa pandemi COVID-19. Pada tabel 2 terdapat rincian indeks berdasarkan klaster kepulauan.

Tabel 2. Indeks Coping Capabilities

| Klaster Kepulauan | | 2021 | 2020 |
|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Sumatera | Indeks Tertinggi | Batam (0,56) | Batam (0,51) |
| | Indeks Terendah | Bukit Tinggi (0,18) | Prabumulih (0,26) |
| Jawa | Indeks Tertinggi | Surabaya (0,52) | Cilegon (0,55) |
| | Indeks Terendah | Batu Malang (0,16) | Batu Malang (0,29) |
| Kalimantan | Indeks Tertinggi | Banjarbaru (0,37) | Palangkaraya (0,42) |
| | Indeks Terendah | Bontang (0,12) | Bontang (0,10) |
| Bali dan Nusa Tenggara | Indeks Tertinggi | Denpasar (0,39) | Denpasar (0,45) |
| | Indeks Terendah | Bima (0,10) | Bima (0,37) |
| Sulawesi | Indeks Tertinggi | Palopo (0,50) | Gorontalo (0,52) |
| | Indeks Terendah | Palu (0,30) | Palu (0,33) |
| Maluku | Indeks Tertinggi | Tidore (0,56) | Tidore (0,51) |
| | Indeks Terendah | Ternate (0,25) | Ternate (0,37) |
| Papua | Indeks Tertinggi | Jayapura (0,42) | Jayapura (0,42) |
| | Indeks Terendah | Sorong (0,26) | Sorong (0,27) |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023



Gambar 6. Realisasi PAD, DAU, dan DAK Tahun 2020 dan 2021

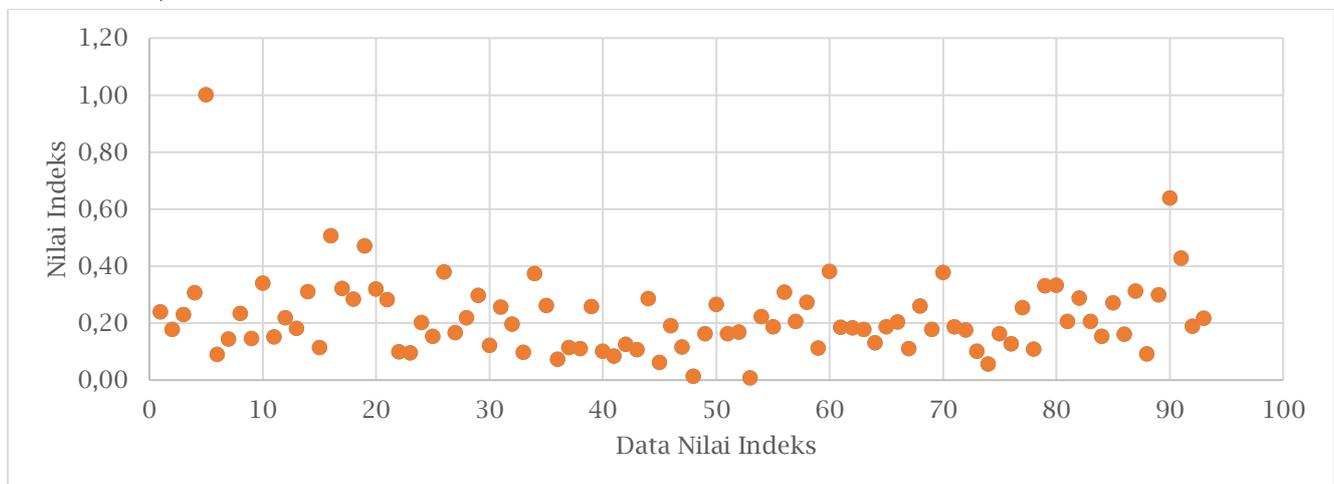
Sumber: Data Olahan, 2023

Pada gambar 6 menunjukkan adanya beberapa pemerintah kota yang mampu merealisasikan PAD melebihi DAU dan DAK dimasa pandemi COVID-19. Pemerintah kota tersebut meliputi Surabaya, Semarang, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung, Tangerang Selatan, Tangerang, Batam, dan Medan. Kota dengan realisasi PAD tinggi akan berbanding lurus dengan nilai indeks *coping capabilities*. Namun, sebagian besar pemerintah kota di Indonesia masih mengandalkan DAU dan DAK untuk menopang pendapatan daerah selama pandemi COVID-19. Ketahanan resiliensi anggaran pemerintah kota di Indonesia masih cukup lemah akibat rendahnya proporsi PAD. Sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mengandalkan dana transfer pemerintah pusat sebagai penopang utama pendapatan daerah. Berdasarkan kondisi ini ketahanan resiliensi anggaran daerah dari indeks *coping*

capabilities masih lemah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem pengelolaan PAD. Pendapatan potensial seperti pajak dan retribusi, peningkatan peranan BUMD, mengefisiensikan belanja, meningkatkan kemitraan daerah dan swasta (Ulya, 2020).

3. Indeks *Vulnerability*

Vulnerability adalah indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan jumlah realisasi pendapatan dan belanja daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk (Ritonga, 2015). Indeks *vulnerability* merupakan penilaian atas resiliensi anggaran untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ritonga et al., 2019). Penilaian indeks *vulnerability* membandingkan jumlah penduduk dengan realisasi pendapatan dan pengeluaran daerah. Realisasi pendapatan dan belanja merupakan representasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program kerja selama satu periode anggaran (Ritonga, 2015). *Vulnerability* akan menekankan penilaian terhadap total belanja, belanja modal, belanja operasional, total pendapatan, DAU, dan DAK terhadap total penduduk. Pada gambar 7 menunjukkan bahwa nilai indeks *vulnerability* pemerintah kota di Indonesia berada pada nilai yang sama untuk tahun 2020 dan 2021. Nilai indeks *vulnerability* berada pada 0,00 hingga 0,30. Sedangkan, hanya satu pemerintah kota yang mencapai nilai 1,00 (nilai maksimal).



Gambar 7. Persebaran Nilai Indeks Dimensi *Vulnerability*

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

Indeks *vulnerability* tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh kota Sabang dengan nilai 1,00. Indeks *vulnerability* terendah pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh kota tegal dengan nilai 0,01. Secara nasional indeks *vulnerability* pemerintah kota pada masa pandemi covid stabil pada 0,22.

Indeks *vulnerability* pemerintah kota berdasarkan klaster kepulauan menunjukkan hasil yang stabil pada seluruh wilayah. Pemerintah kota Sabang, Mojokerto, Bontang, Mataram, Pare Pare, Ternate, dan Sorong memperoleh indeks tertinggi pada masing-masing wilayah. Sedangkan, kota Medan, Magelang, Banjarmasin, Bima, Makassar, Ambon, dan Jayapura mendapatkan nilai indeks terendah pada masing-masing wilayah. Hasil perhitungan indeks berdasarkan klaster kepulauan terdapat pada tabel 3.

Tabel 3. Indeks *Vulnerability*

| Klaster Kepulauan | | 2021 | 2020 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Sumatera | Indeks Tertinggi | Sabang (1,00) | Sabang (1,00) |
| | Indeks Terendah | Medan (0,08) | Medan (0,08) |
| Jawa | Indeks Tertinggi | Mojokerto (0,38) | Mojokerto (0,38) |
| | Indeks Terendah | Magelang (0,01) | Magelang (0,01) |
| Kalimantan | Indeks Tertinggi | Bontang (0,38) | Bontang (0,38) |
| | Indeks Terendah | Banjarmasin (0,11) | Banjarmasin (0,11) |
| Bali dan Nusa Tenggara | Indeks Tertinggi | Mataram (0,16) | Mataram (0,16) |
| | Indeks Terendah | Bima (0,05) | Bima (0,05) |
| Sulawesi | Indeks Tertinggi | Pare Pare (0,33) | Pare Pare (0,33) |
| | Indeks Terendah | Makassar (0,11) | Makassar (0,11) |
| Maluku | Indeks Tertinggi | Ternate (0,64) | Ternate (0,64) |
| | Indeks Terendah | Ambon (0,09) | Ambon (0,09) |
| Papua | Indeks Tertinggi | Sorong (0,21) | Sorong (0,21) |
| | Indeks Terendah | Jayapura (0,19) | Jayapura (0,19) |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

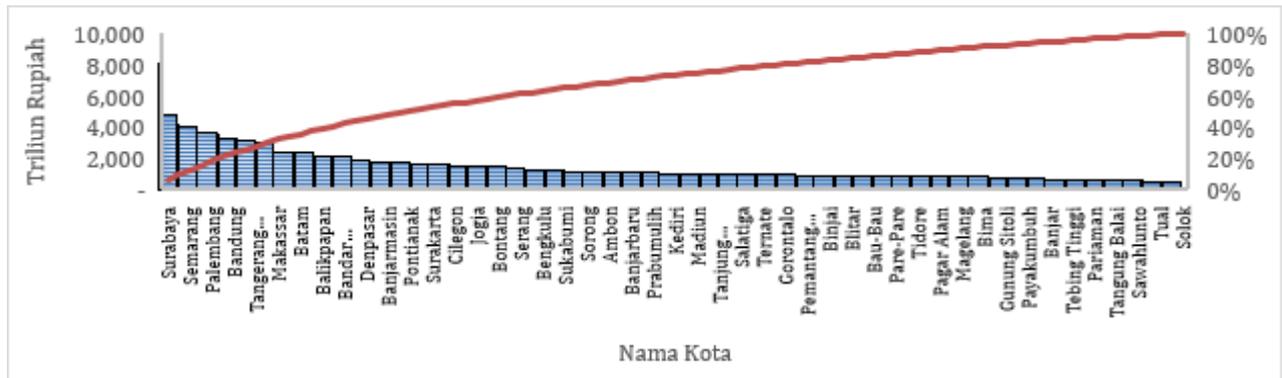
Indeks *vulnerability* pemerintah kota di Indonesia cukup stabil jika dihadapkan dengan pandemi COVID-19. *Vulnerability* dalam ketahanan anggaran sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu daerah. Pemerintah kota dengan jumlah penduduk kecil akan memiliki indeks yang tinggi. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang kecil berbanding lurus dengan jumlah kasus covid yang rendah. Sebaliknya, pemerintah kota dengan jumlah penduduk yang besar memiliki jumlah kasus covid yang tinggi. Kondisi ini berbanding lurus dengan nilai indeks *anticipatory capabilities* yang rendah. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan indeks yang menunjukkan bahwa pemerintah kota Sabang, Mojokerto, Bontang, Mataram, Pare Pare, Ternate, dan Sorong memiliki nilai indeks tertinggi.

Penyebaran virus COVID-19 sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat. Pemerintah kota dengan jumlah penduduk yang besar, ekonomi daerah yang besar, menyebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terjadi begitu cepat pada wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Gambar 4 menunjukkan kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah melebihi 30 ribu kasus terjadi pada Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Semarang, Surakarta, Jogja, Balikpapan, Denpasar, Gorontalo, Makassar, Jayapura, dan Sorong. Jumlah kasus COVID-19 mempengaruhi kondisi resiliensi anggaran daerah, hal ini menyebabkan penurunan ekonomi. Pemberlakuan aturan PSBB level 1 untuk mengurangi penyebaran virus berpengaruh terhadap penurunan kondisi ekonomi daerah.

Pemerintah kota dengan tingkat ekonomi yang besar mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah ketika menghadapi pandemi. Pada gambar 8 realisasi belanja operasional terbesar dilakukan oleh kota Surabaya, Semarang, Palembang, Bandung, Tangerang Selatan, Makassar, dan Batam.

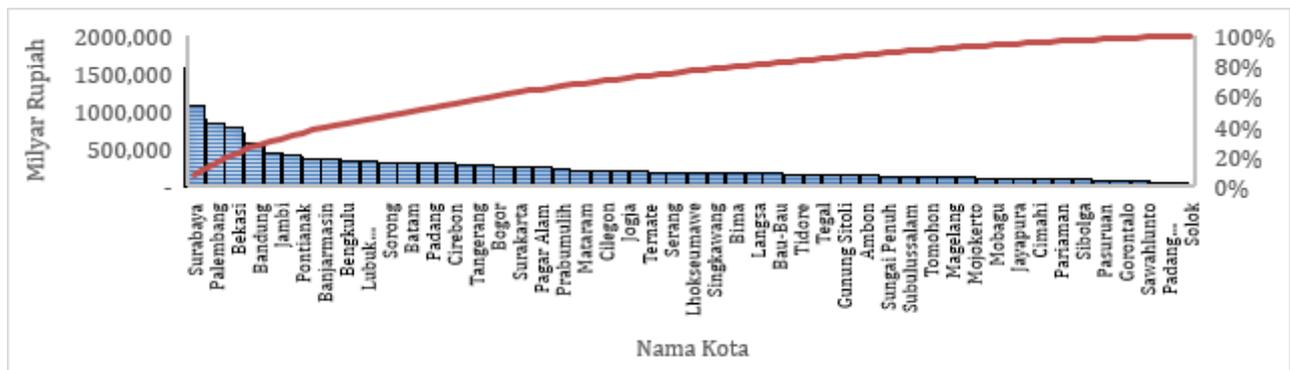
Pada gambar 9 realisasi belanja modal tertinggi dilakukan oleh kota Surabaya, Palembang, Bekasi, Bandung, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, dan Bengkulu. Pada masa pandemi COVID-19 realisasi belanja daerah tidak terpengaruh, pemerintah

kota dengan tingkat APBD yang tinggi dan jumlah kasus yang besar tetap melaksanakan program kerja dengan baik.



Gambar 8. Realisasi Belanja Operasional Tahun 2021

Sumber: Data Olahan, 2023



Gambar 9. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

Sumber: Data Olahan, 2023

KESIMPULAN

Resiliensi anggaran pemerintah kota menjadi faktor penting dalam penanggulangan kasus COVID-19 di Indonesia. Strategi dan upaya penanganan COVID-19 seperti vaksinasi massal, penambahan fasilitas kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat hingga ekonomi daerah. Penilaian resiliensi anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam mempertahankan kondisi APBD ditengah terjadinya kondisi tidak terduga. Penilaian indeks resiliensi anggaran menunjukkan bahwa kota Mataram, Tidore, Batam, dan Sabang sebagai kota dengan indeks tertinggi. Sedangkan, pemerintah kota Bengkulu, Bontang, dan Tegal memperoleh nilai indeks terendah. Pemerintah kota dengan nilai indeks tertinggi memiliki kemampuan yang

baik dalam pengelolaan APBD sehingga dapat merealisasikan strategi penganggulangan pandemi COVID-19 secara lebih optimal. Pemerintah kota dengan nilai indeks terendah memerlukan optimalisasi pengelolaan APBD dimasa depan ketika menghadapi kondisi tidak terduga.

Indeks resiliensi anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah realisasi pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, demografi dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting diluar kapasitas fiskal daerah. Pada masa pandemi COVID-19 pemerintah kota dengan jumlah realisasi APBD yang tinggi seperti Surabaya, Makassar, Palembang, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Batam. Pemerintah kota dengan resiliensi anggaran yang tinggi berbanding lurus dengan jumlah kasus COVID-19. Kondisi ini didororong oleh jumlah penduduk yang besar dan mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga berdampak kepada jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah dimasa pandemi COVID-19 tidak terlalu terpengaruh. Pemerintah kota tetap bisa menjaga jumlah realisasi anggaran hingga mampu meningkatkan resiliensi anggarannya ditengah pandemi. Pemerintah kota dengan tingkat perekonomian terbesar di Indonesia tetap mampu menjaga realisasi APBD. Namun, pemerintah kota dengan resiliensi anggaran yang rendah dan sangat bergantung pada pendapatan dana transfer pemerintah pusat, perlu melakukan optimalisasi sistem pengelolaan keuangan khususnya ketika menghadapi kejadian tidak terduga.

DAFTAR RUJUKAN

- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 957-965. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>
- Auerbach, A., Auerbach, A. J., Gale, W., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). *Fiscal Effects of COVID-19*. 1-98.
- Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., Schmidt, A. L., Valensise, C. M., Scala, A., Quattrocioni, W., & Pammolli, F. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(27), 15530-15535. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>
- Clouston, S. A. P., Natale, G., & Link, B. G. (2021). Socioeconomic inequalities in the spread of coronavirus-19 in the United States: A examination of the emergence of social inequalities. *Social Science and Medicine*, 268(November 2020), 113554. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113554>
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiyah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/economies10050108>
- Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan. (2022, Maret 1). *DJPK Kementerian Keuangan RI*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

- Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *E - Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1-20.
- Green, D., & Loualiche, E. (2021). State and local government employment in the COVID-19 crisis. *Journal of Public Economics*, 193. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104321>
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(5), 75-80.
- Indriani, I. K. et al. (2022). The Effect Financial Condition on Covid 19 Case (Empirical Study on Local Government in West Kalimantan). *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1394-1410. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Indriani, I. K. (2022). THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET CAPACITY ON COVID-19 CASES HANDLING: STUDY IN DISTRICT GOVERNMENT OF KALIMANTAN ISLAND (PROJECTION IN FACING PANDEMIC) Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Pontianak , Jalan Ahmad Yani Pontianak , Indonesia THE EF. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 37-54. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2292>
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2019). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 159-173. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7675/2970>
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Data Sebaran*. Jakarta: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved April 10, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 140-162.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Nasional, K. P. C. 19 dan P. E. (n.d.). *Data Penyebaran Kasus Covid 19*. Komite Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- OECD. (2020a). *Initial Budget and Public Management Responses to the Coronavirus(COVID-19) Pandemic in OECD Countries. April*, 1-206.
- OECD. (2020b). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey. *OECD Regional Development Papers*, 5.
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142-164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and*

Investment, 20(2), 1-25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>

Sanjaya, N. (2020). Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study at the Regional Government of Banten Province). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 273-290.

Satgas Tugas Penanganan COVID-19. (2022, Mei 20). *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. Retrieved Mei 20, 2022, from Satuan Tugas Penanganan COVID-19: <https://covid19.go.id/id/peta-sebaran>

State, Y. (2020). *Local Government Revenue Challenges During the COVID-19 Pandemic Under Pressure : July*.

Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80-109. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>

Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: balancing prevention and control with socioeconomic recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 929-937. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>